

LAKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI

Tahun 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan karena atas perkenaanNya Laporan Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sulut bertujuan untuk membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dalam seluruh pelaksanaan program perumahan di Indonesia agar semakin cepat dan baik serta lebih meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 1046/KPTS/M/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor 033.071.401676/2018 Tahun Anggaran 2018.;

Melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan maka sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018.

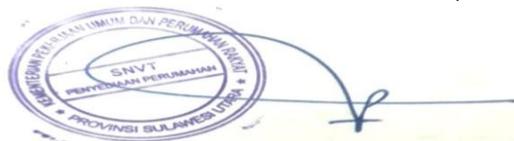
Laporan Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sulut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 menginformasikan tentang :

1. Uraian singkat mengenai organisasi
2. Rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan
3. Pengukuran Kinerja
4. Evaluasi dan analisa kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud termasuk analisa efisiensi penggunaan sumber daya

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah mempercayakan SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sulut dalam membantu pelaksanaan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 dalam program perumahan.

Semoga Laporan Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sulawesi Utara Tahun 2018 dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas yang diberikan SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Manado, Desember 2018
Kepala SNVT Penyediaan Perumahan
Prov. Sulawesi Utara,

The image shows a circular official stamp of the SNVT (Specialized Service Unit) for Housing Provision in North Sulawesi Province. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT', 'SNVT', 'PENYEDIAAN PERUMAHAN', and 'PROVINSI SULAWESI UTARA'. A blue ink signature is written over the stamp.

RECKY W. LAHOPE, ST, MT
Nip. 19710313 200212 1 008



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan wujud akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 pada prinsipnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2018 yang terkait dengan Kegiatan Perencanaan Pengendalian, Pembangunan Rumah Susun/Rumah Khusus, serta Pemberdayaan Rumah Swadaya meliputi

1. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan;
2. Pemberdayaan Rumah Swadaya;
3. Penyediaan Rumah Khusus;
4. Penyediaan Rumah Susun;
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Menteri.

Pelaksanaan Kegiatan SNVT Penyediaan Perumahan Tahun 2018 yang efektif, akuntabel, transparan dan terus menunjang kebijakan-kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara keseluruhan, sehingga program- program penyediaan infrastruktur yang menjadi target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hasilnya dapat dimanfaatkan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan sasaran strategis dan indikator Kinerja Utama pada SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2017 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI
Terselenggaranya Program di Bidang Perumahan, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, IEfisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur	1. Presentase Penyusunan Perencanaan Penyediaan	100%	100%
	2. Prosentase Hasil Pemberdayaan Rumah Swadaya	100%	100%
	3. Presentase Hasil Pembangunan Rumah Khusus	100%	100%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI
	4. Presentase Hasil Pembangunan Rumah Susun	100%	100%

5. Prosentase Hasil Pemberdayaan

Rumah Swadaya

99.19

100%

Dalam rangka meningkatkan kinerja tahun mendatang maka SNVI
 Penyediaan Perumahan melakukan langkah-langkah antara lain:

- Menyusun rencana program Rumah Susun serta Rumah Swadaya demi mengurangi Backlog kepemilikan rumah masyarakat Berpenghasilan Rendah dan mendukung Program 1 Juta Rumah Presiden RI Indonesia
- Tertib Administrasi pengelolaan Administrasi Perkantoran, Pemberdayaan Rumah Swadaya serta Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus
- Meningkatkan kompetensi ASN da Non ASN
- Menegakkan disiplin pegawai untuk menerapkan peraturan kepegawaian dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta kode etik baik PNS maupun Non PNS.
- Melaksanakan Petunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pelaksanaan Pelelangan dini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- I. Latar Belakang
- II. Tugas dan Fungsi
- III. Struktur Organisasi
- IV. Isu Strategis Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- I. Uraian Singkat rencana Strategis

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

- I. Sumber Daya Manusia
- II. Sarana Prasarana
- III. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

- I. Capaian kinerja organisasi
- II. Perbandingan Kinerja Organisasi
- III. Analisis Kinerja Organisasi
- IV. Hal-Hal Yang Memerlukan Perhatian Untuk Peningkatan Kinerja
- V. Efisiensi dan Efektivitas



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah termuat laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB No.53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dipergunakan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

1.2. Tugas dan Fungsi

Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :15/PRT/M/2015 yang dapat menjadi panduan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada umumnya dalam mendesain struktur organisasi.



a) Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sulawesi Utara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tugas dan fungsi SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas, SNVT Penyediaan Perumahan sebagai perpanjangan tangan Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- Melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, Susun dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- Melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- Pelaksanaan administrasi SNVT Penyediaan Perumahan ;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

b) Tugas SNVT Penyediaan Perumahan sesuai dengan Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yaitu Membantu Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Struktur Organisasi

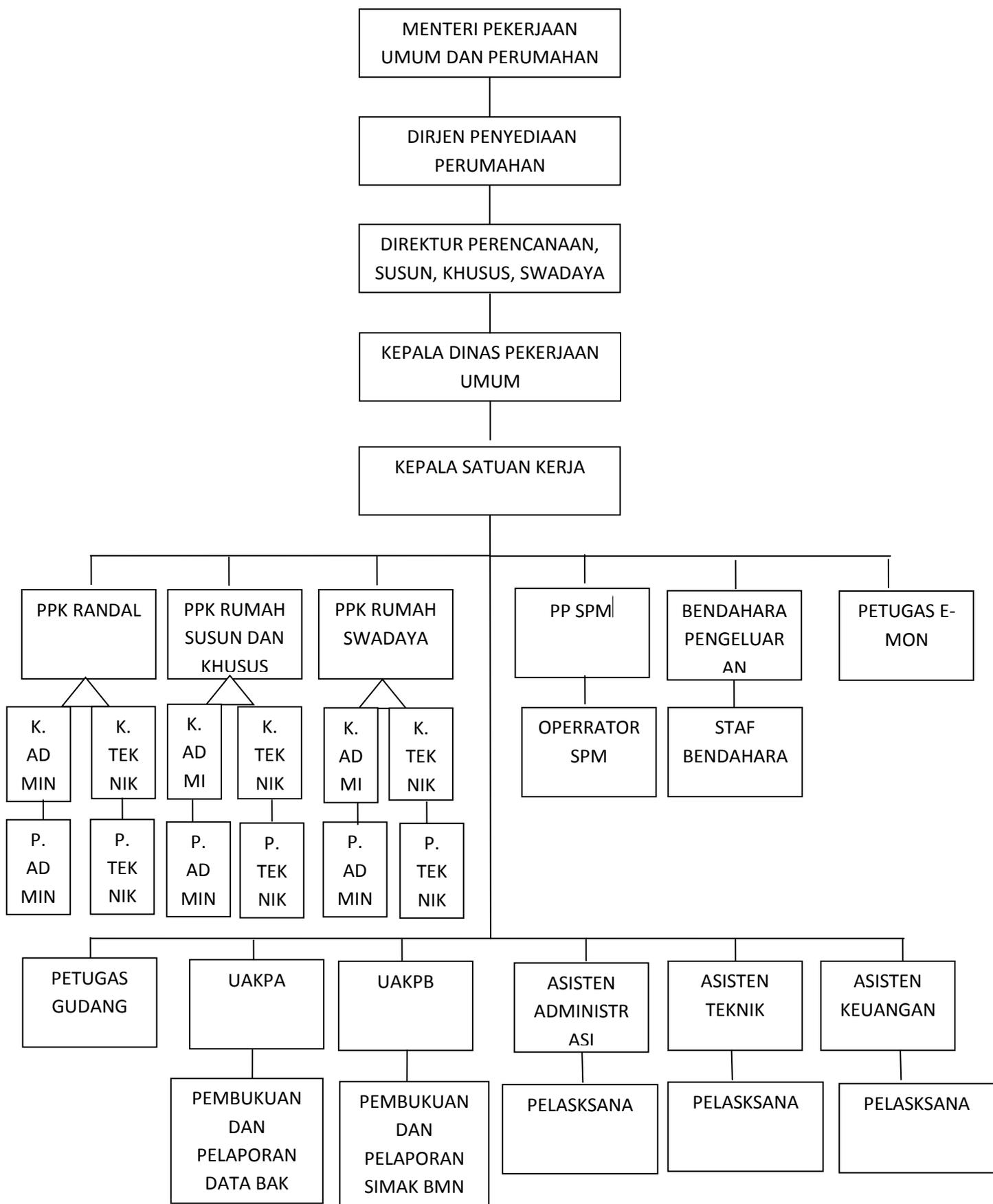
Kapasitas struktur, struktur organisasi yang baik dan tepat dapat menjawab tantangan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Struktur organisasi yang baik menganut prinsip miskin struktur dan kaya fungsi.

Sumber daya manusia SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil = 16 Orang
- b. Tenaga Harian Lepas = 24 Orang

Struktur Organisasi SNVT Penyediaan Perumahan ditetapkan dengan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 15/PRT/M/2015, tanggal 21 April 2015 sebagai berikut :





1.4. Isu Strategis Organisasi

Secara garis besar, permasalahan yang ada di SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan kegiatan pengawasan intern, antara lain:

- a. Sarana dan prasarana alat uji teknik/uji mutu dinilai masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan akhir pekerjaan pembangunan kegiatan uji teknik/uji mutu masih terbatas dan belum dilakukan sepenuhnya dan kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas hasil
- b. Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis regulasi-regulasi baru sehingga rekomendasi yang diberikan tidak sesuai dengan regulasi terbaru;
- c. Keterbatasan waktu dalam melakukan reuiu RKAK/L.
- d. Kurangnya sumber daya manusia untuk tenaga teknis pada setiap PPK.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sasaran strategis bagi SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kinerja yang hendak dituju dan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terprogram dan terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) periode sejalan dengan tujuan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Membuat kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
2. Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitas penyediaan, Penyediaan Perumahan, Pembangunan rumah khusus, Susun dan Pemberdayaan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Melaksanakan kebijakan perumahan di bidang penyediaan pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan.
4. Membuat norma, standart, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perumahan.
5. Memberikan bimbingan teknis dan supervise dibidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
7. Melaksanakan tugas lain yan ciberikan oleh Menteri.

Arah kebijakan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menitikberatkan sebagai berikut :

a. Jangka panjang

Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi system penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi pengendalian perumahan komersil dan Perumahan umum, Pembangunan Rumah Khusus, Pembangunan Rumah Susun, pemberdayaan perumahan Swadaya dan fasilitas perumahan.

b. Jangka menengah dan tahunan

- Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah.
 - a. Pengendalian pembangunan rumah tapak, percepatan pembangunan rumah susun diparkotaan.
 - b. Pengembangan sistem pertanahan perumahan, penyediaan dan pencadangan lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf.
- Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan.
 - a. Pengendalian Perumahan Komersil melalui, penerapan hunian berimbang serta penetapan intensif dan disentif.
 - b. Penguatan Perumahan Umum melalui, fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakakan oleh swasta, serta pembangunan apartemen murah (rusun) baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar.
 - c. Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
 - d. Fasilitasi Perumahan Khusus melalui pembangunan rumah khusus, Revitalisasi Rumah Susun, pekerja, PNS, dll.



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

Kapasitas organisasi mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Kapasitas kelembagaan mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain.

Definisi pengembangan kapasitas setidaknya mencakup beberapa hal berikut, yaitu :

- Pengembangan kapasitas merupakan proses yang berlangsung;
- Pengembangan kapasitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai fungsi dan pencapaian sasaran;
- Pengembangan kapasitas meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dan menyelesaikan permasalahan;
- Pengembangan kapasitas termasuk menciptakan kemampuan untuk menguraikan isu saat ini dan mengantisipasi isu relevan dimasa mendatang.

Tata kelola lembaga yang baik ditunjukkan oleh beberapa hal seperti terjadi proses check and balance di tataran internal lembaga, komunikasi internal yang menjunjung keterbukaan dan kesetaraan, orientasi organisasi yang jelas, kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan eksternal maupun internal lembaga dengan tetap berpegang kepada orientasi organisasi dan terjadi pelembagaan pengetahuan yang telah diperoleh guna mendukung kapasitas organisasi.

3.1. Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah . Dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi akan tercapai. Hal ini, dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap stakeholders. Oleh karena itu kementerian/lembaga perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat

meningkatkan pengetahuan pegawai. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengembangkan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan – bimbingan teknis kepada pegawai. Namun demikian, sebagian besar kegiatan tersebut masih bersifat parsial-parsial, belum dikaitkan dengan kebutuhan kedepan. Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas karena SDM yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kinerja organisasi yang optimal. Oleh karena itu, masih dibutuhkan langkah-langkah kongkrit dari Dijen Penyediaan Perumahan untuk lebih meningkatkan SDM pegawai yang ada di SNVT.

- a. Rekapitulasi ASN dan Non ASN di Lingkungan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat

PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	N a m a	N I P	J a b a t a n
1.	Recky Lahope, ST, MT	19710313 200212 1 008	Kepala Satker Penyediaan Perumahan
2.	Stenly Tangkere, ST	19750413 200501 1 010	PPK Rumah Susun Dan Rumah Khusus
3.	Valrie Valke Sumaraw, SST	19700216 199203 2 008	PPK Perumahan Swadaya
4.	Lady A .B. C. Ruru, s.sos	19690827 199201 2 001	Bendahara Pengeluaran
5.	Detje Polla, SE	19631224 199003 2 005	Pejabat Spm
6.	David R. Putong, ST	19820415 201001 1 008	Penyusun Program dan Anggaran
7.	Hendra Tumilantouw, SH, ST	19860129 201001 1 003	Pelaksana Teknik
8.	Magdalena Y. Katiandagho, ST, M.Si	19750331 201001 2 005	Pelaksana Teknik
9.	Rinni S.E. Wowiling, ST	19810421 200902 2 002	Pelaksana Teknik
10.	Suparno, ST	19801103 201001 1 006	Pelaksana Teknik
11.	Lanny Mamudi, ST	19840814 201001 2 015	Pelaksana Teknik
12.	Arnd A. Sondey, ST	19820701 201001 1 013	Pelaksana Teknik
13.	Jacoba L. Polii	19661123 199203 2 001	UAKPA Penata Keuangan
14.	Emmy Sinjal	19670518 199603 2 001	UAKPB Pengolah BMN
15.	Boyke Languju	19620412 198303 1 040	Penata Kepegawaian
16.	Joural Watania	19660522 201212 1 001	Pengadministrasian Umum



TENAGA KERJA HARIAN LEPAS
Golongan III

No	N a m a	Gol	J a b a t a n
1.	Silvana Saleh, ST	III	Staff Teknik
2.	Ronald Manumus, ST	III	Staff Teknik
3.	Hedy Sambenthiro, ST	III	Staff Teknik
4.	Rivo R. Mumek, ST	III	Staff Teknik
5.	Jeff Kurmasela, S.Kom	III	Staff Non Teknik
6.	Grandy B. Lumampow, SST	III	Staff Non Teknik
7.	Pamela Rompas, SE	III	Staff Non Teknik
8.	Karen B. Mumek, SE	III	Staff Non Teknik
9.	Vicaristy A. Tumengkol, SE	III	Staff Non Teknik
10.	Kosarina Sumarsono, S.Ap	III	Staff Non Teknik
11.	Dharmasatya Junior, SE	III	Staff Non Teknik
12.	Andre Stenly, SE	III	Staff Non Teknik
13.	Braifly Stirman, ST	III	Staff Non Teknik
14.	Brando Tendean, SH	III	Staff Non Teknik
15.	Arina Husain, SE	III	Staff Non Teknik

Golongan II

No	N a m a	Gol	J a b a t a n
1.	Monica F. Dengah	II	Staff
2.	Gerald Sambenthiro	II	Staff
3.	Christy Rumopa	II	Staff
4.	Regina Simbar	II	Staff
5.	Reza J. R Poluan	II	Staff
6.	Evita M. P. Siring	II	Staff
7.	Kennedy Narande	II	Staff
8.	Youlanda Kansil	II	Pramubakti
9.	Hendrik Manoppo	II	Pengemudi

Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir		
Master (S2)	S2	3 (Orang)
Sarjana (S1)	S1	8 (Orang)

3.2. Sarana Prasarana

1. Kepastian hukum dan kejelasan regulasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan visi dan misinya. Pengalokasian sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja, serta pemeliharaan dan pendayagunaan inventaris sangat menunjang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.



2. Ketersediaan dokumen proses operasional dalam bentuk prosedur ISO 9001:2008 menjadi pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari, sekaligus menjadi panduan dalam memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pengembangan kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan) ini terdiri atas pengembangan kapasitas prosedur kerja, pengembangan kapasitas budaya kerja, Penetapan sasaran kinerja pegawai, dan kapasitas kepemimpinan yang efektif. Dengan tersedianya dokumen prosedur kerja yang harus dilaksanakan akan menciptakan tatanan fungsi organisasi yang ideal dan efisien. Prosedur kerja untuk setiap kegiatan dan jenis pelayanan tidak saja bermanfaat bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas mereka sehari-hari, tetapi juga dapat menjadi informasi bagi masyarakat akan tahapan-tahapan pelayanan yang harus mereka lalui dalam mendapatkan pelayanan yang baik, dengan catatan bahwa prosedur atau standar pelayanan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara telah mengembangkan standard operating procedure (SOP) yang menjadi pedoman dalam bentuk prosedur.

3. Hal lain yang dapat meningkatkan kapasitas proses operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah kebiasaan-kebiasaan positif dan nilai-nilai yang berkembang dari hasil interaksi antara pegawai, dan interaksi antara pimpinan dengan pegawai, telah mengupayakan beberapa metode untuk memperbaiki budaya kerja yang efektif tersebut. Kapasitas proses operasional juga tergantung pada kepemimpinan. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara telah menjalankan praktek kepemimpinan efektif, dengan adanya komitmen dan keseriusan dari Kasatker, PPK, serta seluruh staff di setiap bidang untuk duduk bersama merumuskan masing-masing kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk perencanaan sasaran kinerja pegawai selama satu tahun anggaran yang di reviu setiap enam bulan sekali..

3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Ketersediaan sumber daya keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mulai dari tahap penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh unit kerja, pengalokasian anggaran yang telah sesuai dengan beban tugas dan fungsi organisasi, serta pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.



Indikasi Kebutuhan Pendanaan SNVT Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 – 2019

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN		ALOKASI ANGGARAN (JUTA RUPIAH)				
		2016	2017	2018	2019	TOTAL
SASARAN PROGRAM						
1	Tercapainya pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	43.546,269	103.873.000	130.868.000.000		
KEGIATAN 1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYEDIAAN						
SASARAN KEGIATAN			3.342.300			
1	Rencana dan Program	480,884	387.000	354.000.000		
2	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	294,430	412.000	419.000.000		
3	Layanan Perkantoran	1,712,228	1.761.000	75.000.000		
4	Layanan Internal	231,000	104.300	1.761.000.000		
5	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	50,000	-	-		
6	Peningkatan Sinergitas Kelembagaan Penyediaan Perumahan		678.000	549.000.000		
KEGIATAN 2 : Pemberdayaan Perumahan Swadaya						
SASARAN KEGIATAN		33,223,611	59.452.000			
1	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	30,000,000	54.000.000	60.000.000		
2	Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan BPS	3,223,611	5.452.000	7.623.000.000		
KEGIATAN 3 : PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS DAN PEMBINAAN RUMAH NEGARA						
SASARAN KEGIATAN		7,554,056	41.079.000			
1	Pembangunan Rumah Khusus	7,554,056	30.433.602	11.951.000.000		
2	Pemeliharaan Rymah Khusus	-	517.398	-		
3	Pemeliharaan Rumah Susun	-	10.128.000	-		
4	Pembangunan Rumah Susun			33.674.000.000		



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan kegiatan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018 yakni Menyelenggarakan Kebijakan di Bidang Perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sulut mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek/tahunan. Penetapan tujuan sangat penting baik sebagai arah jalannya organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan SNVT Penyediaan Perumahan Prov. Sulut dan menjadi kewajiban setiap organisasi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Rencana strategis tersebut dituangkan ke dalam rencana pengawasan lima tahunan dan rencana kegiatan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		REALISASI 2018	
			TARGET (%)	% REALISASI	TARGET (%)	% REALISASI	TARGET (%)	% REALISASI	TARGET (%)	% REALISASI	TARGET (%)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terselenggaranya Program di Bidang Perumahan, Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, IEfisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur	1. Prosentase Penyediaan Perumahan	100%	30%	27,61 %	%	46,52 %	%	65,54%	100 %	85,41 %	100%	100%
	2. Prosentase Hasil Pembangunan Rumah swadaya	100%	30%	0,15%	60%	19,01 %	90%	92,42%	100 %	98,72 %	100%	100%
	3. Prosentase Pembangunan Rumah Khusus	100%	30%	0,32%	60%	18,42 %	90%	34,63%	100 %	97,53%	100%	100%

	4. Pembangunan Rumah Susun	100%	10%	0,04%	40%	17,17 %	70%	40,49%	100 %	99,86%	100%	100%
--	----------------------------	------	-----	-------	-----	---------	-----	--------	-------	--------	------	------



4.2. Perbandingan Kinerja Organisasi

a. Prosentase Data RTLH serta Jumlah Backlog Perumahan

Pada tahun anggaran 2018 dalam Program Perencanaan Perumahan dilakukan Pendataan RTLH demi mencapai backlog perumahan dalam rangka perencanaan kegiatan di bidang perumahan, serta Pendataan Inventarisasi Aset yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka percepatan pelaksanaan Hibah, pada pelaksanaan kegiatan permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya partisipatif dari kabupaten/Kota dalam membantu pelaksanaan kegiatan.

b. Prosentase Hasil Pemberdayaan Rumah swadaya

- Pada tahun anggaran 2018, target penuntasan pelaksanaan Pembangunan peningkatan kualitas rumah swadaya yang ada dimana sampai dengan triwulan IV Fisik mencapai 100% penyerapan anggaran 100%, adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sehingga tidak mencapai 100% yaitu, Sesuai dengan Verifikasi Proposal Calon Penerima Bantuan berjumlah 4000 Rumah adapun terdapat 5 calon Penerima Bantuan Tidak sanggup untuk berswadaya sehingga anggaran ,tersebut akan dikembalikan ke kas negara;

c. Prosentase Pembangunan Rumah Khusus berjumlah 100 Unit yang tersebar di dua lokasi yaitu di Kabupaten Minahasa Selatan 50 Unit dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 50 Unit dengan Presentase realisasi sampai dengan Bulan Desember Fisik 100% dan Keuangan 100%;

c. Presentase Pembangunan Rumah Susun sampai dengan bulan desember yaitu fisik 100% dan Keuangan 100%, Pembangunan terletak di Kota Manado 1 Tower untuk ASN Pemprov Sulut, 1 Tower untuk Mahasiswa IAIN Kota Manado dan 1 Tower untuk Pekerja di Kabupaten Minahasa.

4.3. Analisis Kinerja Organisasi

Langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi kemungkinan permasalahan yang akan terjadi di tahun mendatang sehingga berbagai kendala seperti yang terjadi pada tahun dilaporkan dapat diminimalisir dengan :

- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Lebih melakukan pengawasan serta melakukan pendekatan moril



terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Kelompok Penerima Bantuan dengan tujuan membuat penerima bantuan lebih terpacu dalam penyelesaian pembangunan rumah swadaya

- c. Terus melakukan pengawasan secara berkala terhadap kemajuan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus dan Pembangunan Rumah Susun beserta kelengkapan administrasi dalam berupaya meminimalisir penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - 1) Mengembangkan dan memutakhirkan sistem informasi
 - 2) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja
 - 3) Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan
 - 4) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian tindak lanjut.
- e. Lebih mengetahui tentang peraturan perundang-undangan terutama di bidang perumahan.



Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Teknis dan Administratif

NO	No. IKU	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018
1	1	Tersusunnya Rencana, Program dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Laporan	1	1
	1		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan serta Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisas	Laporan	12	12
	1		Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja	Laporan	12	12
2	2	Tersusunnya Laporan kegiatan peningkatan kualitas Rumah Swadaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan kegiatan serta Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisas	Laporan	8	8
	2		Terlaksananya pembangunan	Laporan	3995	3995
	2		Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengawasan	Laporan	12	12
3	3	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan pembangunan Rumah Khusus dan Pembangunan Rumah Susun	Jumlah Laporan Konsultan Pengawasan	Laporan	2.840	2.840
	3		Jumlah Laporan Kegiatan pembangunan rumah khusus dan Pembangunan Rumah Susun	Laporan	2.840	2.840
4	4	Terkelolanya Layanan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian & Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pengelolaan Adminsitasi Perkantoran	Laporan	12	12
	4		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Laporan	12	12
	4		Jumlah Laporan Kegiatan Diklat	Laporan	30	30



4.4. Hal-Hal Yang Memerlukan Perhatian Untuk Peningkatan Kinerja

- a. Meningkatkan apresiasi dan evaluasi atas pemahaman good governance dan good corporate governance kepada para pejabat dan penyedia jasa;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang perumahan;
- c. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP maupun BPK-RI dengan memberikan sanksi sesuai surat edaran Menteri PU No. 01/SE/M/2005 dengan melakukan koordinasi yang intens dan teratur.
- d. Pemanfaatan tenaga fungsional dan kerjasama dengan Litbang dalam rangka pemeriksaan keteknikan/pengujian mutu konstruksi.
- e. Membangun Whistleblowing System (WBS), untuk mencegah dan melakukan deteksi dini dalam proses pengadaan barang dan jasa diperlukan peran serta pegawai secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (whistleblower) melalui whistle blowing system.
- f. Pembentukan zona Integritas dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SNVT Penyediaan Perumahan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- h. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara melakukan penguatan organisasi

4.5. Efisiensi dan Efektivitas

a. Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan

SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara aktif dan berkala memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia untuk lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sehingga dalam melaksanakan tugas – tugasnya dapat memberikan pelayanan prima. dalam peningkatan kualitas sumber daya manusianya secara efektif dan efisien seperti berikut;



Rekapitulasi Peserta Diklat

Uraian Kegiatan	Peserta	
	Rencana	Realisasi
Pembinaan Kepegawaian	3	3
Diklat Pengelolaan BMN	2	2
Diklat Penataan SDM dan Penguatan Organisasi	2	1
Pembinaan Pejabat Perbendaharaan	5	5
Implementasi Sakip	2	2
Pembinaan Pokja	5	5
Diklat Kearsipan	1	1
Bimtek Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Sewa	2	2
Diklat Keuangan	5	5
Diklat Rumah Swadaya	2	2
Diklat Hukum Bidag Perumahan	1	-
TOTAL		
SELISIH		

*data per tanggal 1 Desember 2018

b. Evaluasi dan Analisis Anggaran

Akuntabilitas keuangan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara merupakan pertanggungjawaban kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan atas penggunaan anggaran.

Penyerapan anggaran SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2018 100%



BAB V PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas-tugas SNVT Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada TA 2018, sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Kinerja SNVT Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandai dengan :

1. Prosentase Perencanaan dan Program 100%
2. Prosentase Hasil Pemberdayaan Rumah swadaya 100%
3. Prosentase Pembangunan Rumah Khusus 100%
4. Presentase Pembangunan Rumah Susun 100%

Harapan SNVT Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun mendatang adalah sebagai Perpanjangan Tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah yang dalam hal ini Dirjen Penyediaan Perumahan maka SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara akan berusaha meningkatkan, integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang bebas KKN pada tahun 2025.

**KEPALA SATUAN KERJA NON VERTIKAL
TERTENTU PENYEDIAAN PERUMAHAN
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



RECKY W. LAHOPE, ST, MT
NIP. 19710313 200212 1 008

